

**PENYELESAIAN MASALAH PERWALIAN OLEH BALAI HARTA
PENINGGALAN SEBAGAI WALI PENGAWAS TERHADAP
ANAK DI BAWAH PERWALIAN KARENA
PENETAPAN PENGADILAN
(Studi Kasus BHP Semarang dan Pengadilan Negeri Semarang)**

oleh
Sindy Tjhin¹, Ninik Darmini²

INTISARI

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis korelasi antara BHP Semarang dan Pengadilan Negeri mengenai penetapan perwalian anak serta untuk mengetahui dan menganalisis penyelesaian masalah mengenai pengurusan benda atau harta kekayaan oleh BHP Semarang sebagai wali pengawas karena adanya penetapan Pengadilan Negeri.

Penelitian ini adalah penelitian hukum empiris. Data primer hasil wawancara kepada responden serta data sekunder yang diperoleh dari studi pustaka atau penelitian kepustakaan. Setelah melakukan analisis kualitatif, kesimpulan penelitian ini diberikan penjelasan secara deskriptif.

Hasil penelitian ini (1) Korelasi BHP Semarang dan Pengadilan Negeri Semarang berkaitan dengan penetapan perwalian anak di bawah umur meliputi penyampaian seluruh salinan penetapan perwalian, memerintahkan panitera pengadilan mengirimkan seluruh salinan penetapan perwalian kepada BHP Semarang melalui surat elektronik atau surat tercatat ke alamat BHP Semarang, pelaporan berakhirnya perwalian dan pemantauan serta evaluasi oleh para pihak (2) Penyelesaian masalah mengenai pengurusan benda atau harta kekayaan oleh BHP Semarang sebagai wali pengawas terhadap anak di bawah perwalian karena adanya Penetapan Pengadilan meliputi mendatangi langsung rumah wali ataupun melalui *zoom* apabila wali tidak hadir dalam pengambilan sumpah, pencatatan harta kekayaan wali tidak dilaksanakan maka diberikan instruksi untuk segera mencatat, wilayah kerja yang luas dari BHP Semarang dan minimnya SDM maka tetap diupayakan kunjungan minimal setahun sekali serta pengawasan melalui media elektronik, dan bagi wali yang terindikasi bertindak curang, BHP Semarang akan melakukan penuntutan pemecatan wali kepada Pengadilan Negeri.

Kata Kunci : Balai Harta Peninggalan, Pengadilan Negeri, Perwalian, Korelasi.

¹ Jalan Wonosari KM 8, Puri Potorono Asri, Banguntapan, Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta

² Program Studi Magister kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada

**RESOLUTION OF GUARDIANSHIP ISSUES BY THE ESTATE AGENCY
AS SUPERVISORY GUARDIAN AGAINST CHILDREN UNDER
GUARDIANSHIP DUE TO COURT ORDER
(Case Study of BHP Semarang and Semarang District Court)**

by
Sindy Tjhin¹, Ninik Darmini²

ABSTRACT

This research intends to ascertain and evaluate the relationship between BHP Semarang and the District Court with respect to the determination of guardianship of children, as well as the resolution of issues pertaining to the management of objects or assets by BHP Semarang in its capacity as supervisory guardian as a result of the District Court's ruling.

This research is empirical legal research. Primary data is the result of interviews with respondents and secondary data obtained from library studies or library research. After conducting qualitative analysis, the conclusions of this research are given a descriptive explanation.

The results of this research (1)The correlation between BHP Semarang and the Semarang District Court regarding the determination of guardianship of minors includes the delivery of all copies of the guardianship determination, ordering the court clerk to send all copies of the determination to BHP Semarang by electronic mail or registered mail to BHP Semarang, reporting the end of guardianship and monitoring and evaluation by the parties (2) Problem solving of property management by BHP Semarang as a supervisory guardian of guardianship children due to Court Determination includes visiting the guardian's house directly or via zoom if the guardian is not present in taking the oath, recording of assets that are not implemented will be given instructions to immediately record, related to the large working area of BHP Semarang and the lack of human resources, it is still attempted to visit once a year and supervision through electronic media, and guardians who are indicated to act fraudulently, BHP Semarang will prosecute the dismissal of the guardian to the District Court.

Keywords : Heritage Hall, District Court, Trust, Correlation.

¹ Jalan Wonosari KM 8, Puri Potorono Asri, Banguntapan, Bantul, Special Region of Yogyakarta.

² Master of Notary Study Program, Faculty of Law, Gadjah Mada University.